

JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

*WONDERFUL INDONESIA: NATION BRANDING FROM THE
PERSPECTIVE OF PUBLIC DIPLOMACY*

Raka Tantra Pamungkas

*STRATEGI HEDGING VIETNAM TERHADAP TIONGKOK DALAM
SENGKETA LAUT TIONGKOK SELATAN*

Isrotul Fajriyah

*RESPONS RUSIA TERHADAP CAMPUR TANGAN AMERIKA PADA
GERAKAN TERORIS ISIS DI TIMUR TENGAH*

Ali Bin Said

*MOTIVASI PENGIRIMAN UN PEACEKEEPING FORCE OLEH
NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS PEACEKEEPING
FORCE BANGLADESH PERIODE 2005 - 2012*

Arif Nur Husain & Aryanta Nugraha

*KEKETUAAN INDONESIA DALAM APEC TAHUN 2013:
MEMBANGUN REGIONALISME ASIA PASIFIK?*

Teuku Rezasyah

*PENOLAKAN UKRAINA ATAS KERANGKA KERJASAMA
ASSOCIATION AGREEMENT DENGAN UNI EROPA TAHUN 2013*

Dimas Andhika Fikri

ASEAN AND TIMOR LESTE'S MEMBERSHIP

Jan Chovancik

Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan

JURNAL STUDI DIPLOMASI DAN KEAMANAN

Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan adalah terbitan berkala dua kali dalam satu tahun. Jurnal ini merupakan media informasi karya ilmiah untuk bidang kajian diplomasi dan keamanan dalam lingkup studi Hubungan Internasional.

Jurnal ini ditujukan untuk menumbuhkan wacana akademik mengenai kajian diplomasi dan keamanan serta mendorong forum belajar mengajar lebih efektif.

Penanggung Jawab
Machya Astuti Dewi

Pengarah
Bastian Yunariono

Ketua Umum
Ludiro Madu

Pemimpin Redaksi
Aryanta Nugraha

Sekretaris Redaksi
Suryo Wibisono

Bendahara
Sri Issundari

Mitra Bestari
Rohanas Harun

Penyunting Ahli
Denik Iswardani

Sirkulasi
Ratnawati

Pelaksana
A. Risdiyanto

Redaksi menerima naskah berupa artikel ilmiah hasil penelitian, kajian internasional yang bersifat ilmiah, dan kajian teoritik, terkait isu diplomasi dan keamanan studi Hubungan Internasional.

Alamat Redaksi :

Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UPN "Veteran"
Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan Yogyakarta
Email : diplomasi.keamanan@gmail.com

Daftar Isi

Wonderful Indonesia: Nation Branding from the Perspective of Public Diplomacy

Raka Tantra Pamungkas _____ 1 - 12

Strategi Hedging Vietnam terhadap Tiongkok dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan

Isrotul Fajriyah _____ 13 - 28

Respons Rusia terhadap Campur Tangan Amerika Pada Gerakan Teroris ISIS di Timur Tengah

Ali Bin Said _____ 29 - 34

Motivasai Pengiriman UN Peacekeeping Force oleh Negara-Negara Berkembang: Studi Kasus Peacekeeping Force Bangladesh Periode 2005-2012.

Arif Nur Husain & Aryanta Nugraha_35 - 48

Keketuaan Indonesia dalam APEC tahun 2013: Membangun Regionalisme Asia Pasifik?

Teuku Rezasyah _____ 49 - 52

Penolakan Ukraina Atas Kerangka Kerjasama Association Agreement Dengan Uni Eropa Tahun 2013.

Dimas Andhika Fikri _____ 53 - 66

ASEAN And Timor Leste's Membership

Jan Chovancik _____ 67 - 78



Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta

MOTIVASI PENGIRIMAN UN PEACEKEEPING FORCE OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS PEACEKEEPING FORCE BANGLADESH PADA TAHUN 2005 – 2012

Arif Nur Husain¹
Aryanta Nugraha²

Abstract

In the last decade, the top 10 ranking in the list of troop contributor countries to UN Peacekeeping Operations is dominated by developing countries, including Bangladesh which is always ranked first or second since 2005. It raises a question about what the motivation of the developing countries willing to send troops in large numbers for UN Peacekeeping Operations?. This paper attempts to investigate the cause of the increased participation of developing countries in UN Peacekeeping Operations, and what the motive behind developing countries willing to send troops in large numbers. On the whole motive of developing countries can be grouped into two, political and economic motives.

Keywords: *UN Peacekeeping Operations, developing countries, Bangladesh*

Pendahuluan

Operasi perdamaian (*peacekeeping operations*) merupakan salah satu agenda dari PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan di dunia. Konsep awal dari *peacekeeping operations* merujuk kepada *collective security* yang memiliki pengertian beberapa atau semua negara yang menggabungkan kekuatan militer mereka untuk melawan atau mencegah agar suatu negara tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk meraih keuntungannya sendiri terhadap suatu negara lain. Konsep dan pemahaman *collective security* didasarkan pada semua korban adalah sama pentingnya dan akan dijawab oleh masyarakat internasional dengan respon yang sama. Tidak terbatas

pada negara maju atau berkembang, negara barat atau negara dunia ketiga (General Assembly A/59/565, 2004: 22-24).

Menurut Ronald J. Fisher, operasi perdamaian PBB dapat diartikan sebagai usaha bantuan kepada suatu negara atau wilayah yang terpecah akibat mengalami konflik atau perang, untuk menciptakan kembali keadaan yang kondusif bagi tercapainya perdamaian melalui intervensi pihak ketiga dengan menggunakan kekuatan multinasional yang terdiri dari kaum sipil, polisi, serta militer (Fisher, 2001: 11).

Operasi perdamaian PBB dimulai pada tahun 1948 ketika Dewan Keamanan menyetujui penempatan pengamat militer PBB ke Timur Tengah. Peran misinya

¹Alumnus Prodi Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta. Email: arifnurh@gmail.com

²Pengajar di prodi Ilmu Hubungan Internasional UPN "Veteran" Yogyakarta.
Email: aryanta.n@gmail.com

adalah untuk memantau gencatan senjata antara Israel dan Arab, sebuah operasi yang dikenal dengan nama *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO). Sejak itu, 69 operasi perdamaian telah dikerahkan oleh PBB. Selama 66 tahun ini, ratusan ribu personil militer, puluhan ribu polisi PBB, serta warga sipil lainnya dari sekitar 120 negara telah berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB, dan lebih dari 3.200 pasukan perdamaian PBB telah tewas sewaktu bertugas di bawah bendera PBB (<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml> diakses pada 26 Mei 2014). Dari 69 operasi perdamaian yang telah dikerahkan oleh PBB hingga Mei 2014, tercatat hanya ada 13 operasi perdamaian yang dijalankan oleh PBB dari awal pelaksanaan hingga akhir Perang Dingin (1948-1988), dan selebihnya operasi perdamaian PBB lebih banyak dikerahkan pasca Perang Dingin (<http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/operationslist.pdf> diunduh pada 27 Mei 2014).

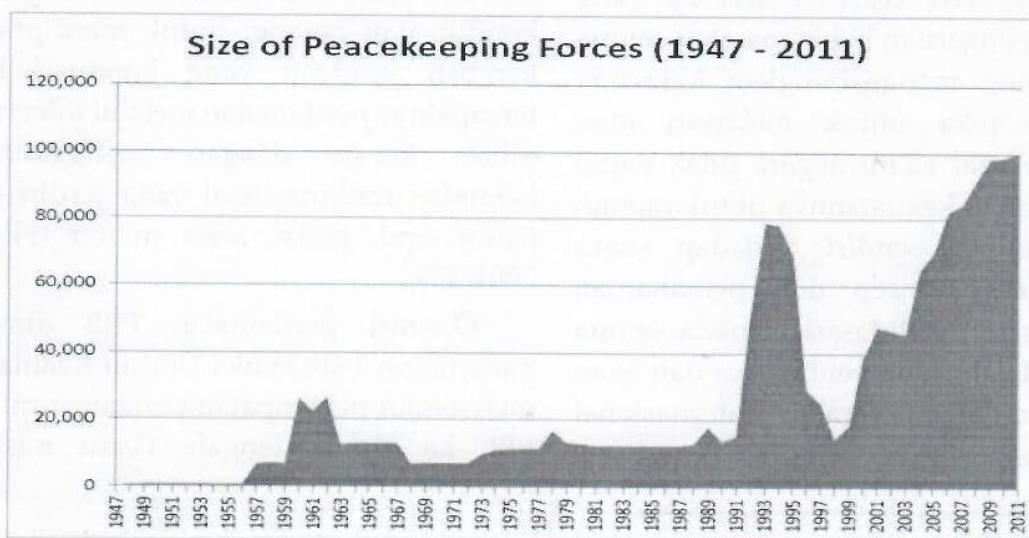
Peningkatan Partisipasi Negara Berkembang Dalam Operasi Perdamaian PBB

Pasca berakhirnya Perang Dingin, terjadi

peningkatan signifikan pada jumlah pasukan dan jumlah operasi yang dikerahkan oleh PBB ke wilayah konflik. Sebagian besar pasukan tersebut berasal dari negara-negara berkembang yang pada satu dekade terakhir mendominasi daftar negara kontributor pasukan perdamaian PBB. Seperti Grafik 1 di bawah yang menunjukkan tingkat jumlah pasukan perdamaian PBB dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi pasukan dari negara berkembang, termasuk Bangladesh pasca berakhirnya Perang Dingin. Pertama, Perubahan peta kekuatan politik internasional akibat disintegrasi Uni Soviet. Ketegangan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga merupakan dua negara yang tergabung di dalam Dewan Keamanan PBB sangat berpengaruh terhadap operasi perdamaian PBB. Hal ini karena Dewan Keamanan merupakan badan PBB yang berwenang dalam mengeluarkan mandat dan otoritas mengenai operasi perdamaian. Berdasarkan Piagam PBB dalam *Chapter V* Pasal 25, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk pemeliharaan

Grafik 1
Tingkat Jumlah Pasukan Perdamaian Tahun 1947-2011



Sumber: <https://www.globalpolicy.org/security-council/peacekeeping/peacekeeping-data.html> diakses pada 9 September 2014.

perdamaian dan keamanan internasional, dan negara-negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Sebagai akibat dari meningkatnya perselisihan antara dua negara adidaya tersebut, sistem *collective security* yang menjadi dasar pada penegakan perdamaian oleh PBB dan konsensus oleh negara-negara besar, menjadi tidak bisa dijalankan (Ram, 2008: 3-5).

Berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet berarti berakhirnya pula kebuntuan forum di dalam Dewan Keamanan dalam menentukan mandat dan otorisasi pelaksanaan suatu operasi perdamaian. Dan periode kerjasama antar negara dalam memelihara perdamaian secara maksimal dimulai saat dunia internasional menanggapi secara *massive* invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 (Krause & Ronziti, 2012: 56).

Kedua, berakhirnya Perang Dingin juga menandai perubahan sifat konflik internasional dari konflik antar negara (*interstate conflict*) ke konflik dalam negara (*intrastate conflict*). Peningkatan konflik dalam negara seperti konflik etnis, konflik agama, aksi separatisme, dan konflik komunal lainnya ini berbanding lurus dengan peningkatan aktivitas PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini terlihat dari adanya penambahan 36 operasi PBB dalam kurun waktu antara 1988-1998, dibandingkan dengan hanya 13 operasi pada masa Perang Dingin (1948-1988) (Widodo 68-87, 2012: 69). Peningkatan intensitas operasi PBB tersebut mengakibatkan meningkatnya pula kebutuhan personil maupun pembiayaan bagi kelangsungan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Karena itulah PBB membutuhkan peran dan bantuan dari negara-negara anggotanya. Hal ini

lah yang dimanfaatkan oleh negara-negara lemah dan negara-negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi aktifnya dalam operasi perdamaian PBB.

Faktor yang ketiga, negara-negara memiliki kapasitas militer yang berlebih pasca Perang Dingin. Karena tantangan strategis yang utama yaitu Perang Dingin telah berakhir, beberapa militer itu sendiri memiliki kepentingan dalam mengambil peran baru untuk menata kembali anggaran mereka.

Keempat, Pemerintah mulai mempertimbangkan operasi perdamaian sebagai "*politically desirable*" atau "kepentingan politik". Globalisasi yang diiringi oleh penyebaran teknologi komunikasi secara massa, yang mampu memberikan laporan hampir seketika suatu bencana kemanusiaan, ditambah dengan kemenangan liberalisme atas komunisme, dan keberhasilan Perang Teluk Pertama telah menciptakan harapan di kalangan publik agar pemerintah mereka juga terlibat dalam menyelesaikan konflik kekerasan di luar negeri. Sebagai contoh, Brazil, Afrika Selatan, dan India yang memberikan komitmen penuh pasukan mereka untuk operasi perdamaian, untuk mendukung klaim mereka agar bisa menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan (Bellamy, Williams, Griffin, 2004: 96).

Kelima, konsep *peacekeeping* yang juga mengalami reformasi dari *traditional peacekeeping* ke *multidimensional peacekeeping* atau yang menurut Bellamy perubahan dari *Westphalian* ke *post-Westphalian* membuat operasi perdamaian PBB menjalankan misi yang lebih kompleks dan tidak lagi hanya sekedar menjalankan misi *monitoring* dan *observing*. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan personil semakin meningkat untuk menjalankan misi-misi seperti membantu untuk membangun lembaga-lembaga pemerintahan yang berkelanjutan,

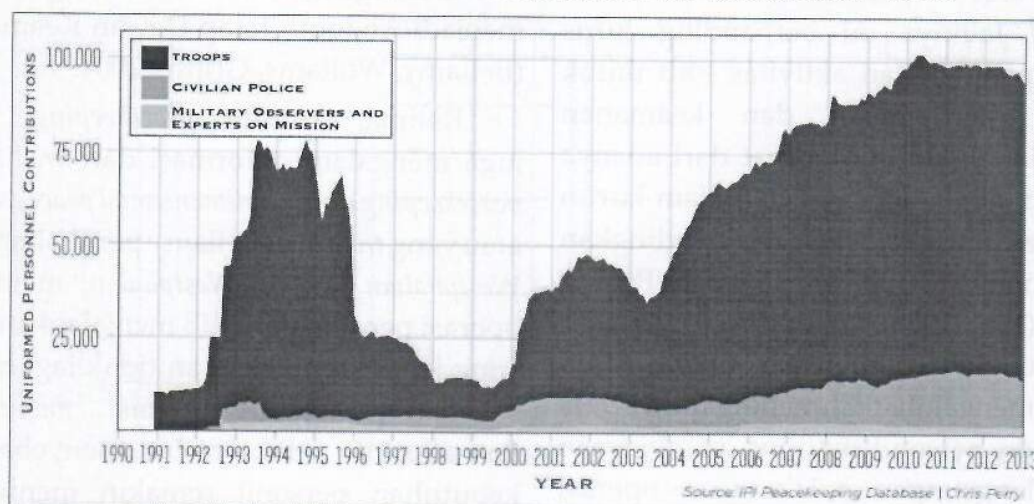
pemantauan hak asasi manusia (HAM), reformasi sektor keamanan, perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan kombatan. Berbagai profesi pun banyak mewarnai operasi perdamaian sekarang ini, diantaranya: administrator, ekonom, polisi, ahli hukum, penjinak ranjau, pengamat pemilu, pemantau hak asasi manusia, spesialis dalam urusan sipil dan pemerintahan, pekerja kemanusiaan, dan ahli dalam komunikasi dan informasi publik (<http://www.unis.unvienna.org/unis/en/60yearsPK/index.html> diakses pada 24 Mei 2014).

Keenam, pada Maret 2000, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk *Panel on United Nations Peace Operations* (dewan ahli dalam operasi perdamaian PBB) untuk menilai kekurangan dari sistem yang ada dan kemudian membuat rekomendasi spesifik dan realistis dalam reformasi operasi perdamaian PBB untuk menyambut tantangan keamanan global pada abad ke-21. Panel tersebut terdiri dari individu-individu berpengalaman dalam *conflict prevention* (pencegahan konflik), *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Hasil rapat

tersebut dikenal dengan nama "*Brahimi Report*", setelah Lakhdar Brahimi, Ketua Panel, merekomendasikan untuk: 1) memperbaharui komitmen politik dari negara-negara Anggota; 2) perubahan kelembagaan yang signifikan; dan 3) meningkatkan dukungan keuangan (<http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/reform.shtml> diakses pada 25 Juni 2014). Setelah adanya pembaharuan komitmen dengan cara mengikat komitmen dari negara-negara anggota ke dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai bagian dari *United Nations Standby Arrangements System (UNSAS)* pasca rekomendasi *Brahimi Report* pada tahun 2000, efeknya, terjadi peningkatan kembali dalam jumlah kontribusi pasukan oleh negara-negara anggota PBB, setelah sebelumnya terjadi penurunan akibat kegagalan operasi perdamaian PBB di Rwanda, Somalia, dan bekas Yugoslavia pada pertengahan tahun 1990-an, seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1

Total Kontribusi Pasukan Perdamaian PBB Tahun 1991 - 2013



Sumber: Chris Perry and Adam C. Smith, *Trends in Uniformed Contributions to UN Peacekeeping: A New Dataset, 1991-2012*, International Peace Institute, New York, 2013. Hal. 3.

Faktor yang terakhir, sesuai dengan argumen Andreas Andersson yang menegaskan bahwa meningkatnya jumlah operasi perdamaian setelah tahun 1990 adalah karena perubahan dari 'realpolitik' ke 'idealpolitik'. Tingkat partisipasi dalam operasi perdamaian meningkat seiring dengan meningkatnya level demokrasi dari negara kontributor dan kemungkinan operasi perdamaian meningkat ketika negara dimana pasukan perdamaian dikerahkan adalah negara non-demokratis. Hal ini mengindikasikan bahwa demokrasi merupakan alasan mengapa negara-negara bersedia mengirimkan pasukannya dan mereka berusaha untuk campur tangan di negara-negara non-demokratis dalam rangka membangun demokrasi, karena semakin banyak demokrasi, maka perang akan lebih sedikit (Andersson, 2000: 18).

Motif Politik Bangladesh Dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB

Peningkatan partisipasi negara-negara berkembang tersebut di atas dalam operasi perdamaian PBB tidak terlepas dari kepentingan nasional yang melatarbelakangi atau menjadi motif dibalik negara-negara berkembang hingga bersedia mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar. Motif-motif tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motif politik dan motif ekonomi.

Selain demi Alasan Normatif, yaitu ikut serta dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia berdasarkan piagam PBB, mandat Dewan Keamanan PBB, dan kebijakan atau konstitusi nasional. Motif Politik yang lebih bersifat pragmatis juga mendorong tingginya kontribusi pasukan dari negara-negara berkembang. Seperti yang diungkapkan oleh William J. Durch dalam bukunya yang berjudul *The Purposes of Peace Operations*, yang mengatakan bahwa ada rasa persaingan diantara negara-

negara pengirim pasukan perdamaian PBB, terutama yang berasal dari satu kawasan yang sama (*prestige*) (Durch & England, 2009: 7). Hal tersebut terbukti dari dominasi negara-negara kawasan Asia Selatan (Bangladesh, Pakistan, India, dan Nepal) dalam sepuluh besar daftar negara kontributor pasukan untuk operasi perdamaian PBB.

Lalu Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams yang mengungkapkan lebih mendetail mengenai motif politik negara berkembang di dalam bukunya yang berjudul *Broadening the Base of United Nations Troop- and Police-Contributing Countries*. Mereka mengatakan bahwa negara-negara berkembang menjadikan operasi perdamaian PBB sebagai alat kebijakan luar negeri mereka untuk meningkatkan citra positif negara (*public goods*) yang sekaligus dapat meningkatkan pengaruh dan posisi negara di tatanan regional maupun internasional.

Selain itu, partisipasi dalam operasi perdamaian PBB juga dapat berasal dari motif yang berhubungan dengan pasukan, sektor keamanan, dan dinamika birokrasi dari negara kontributor. Motif yang bersifat institusional ini biasanya diterapkan oleh negara yang memiliki sejarah otoritarianisme atau pretorianisme militer. Negara tersebut memaknai operasi perdamaian sebagai cara atau kesempatan untuk mengirim tentara militer ke wilayah luar negeri dan menjauhkan militer dari masalah politik di dalam negeri.

Kemudian dalam perkembangannya pada abad ke-21, Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams juga menyatakan bahwa motivasi negara-negara berkembang bersedia mengirimkan pasukan nasionalnya untuk operasi perdamaian PBB adalah untuk memperkuat upaya negara-negara tersebut agar dapat terpilih sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan

PBB. Kecenderungan motivasi ini berlaku untuk negara-negara berkembang yang mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan pada dua dekade terakhir dan tidak memiliki ketertarikan kuat terhadap dana kompensasi yang didapat dari keikutsertaannya dalam operasi perdamaian PBB (Bellamy & Williams, 2012: 3-5).

Hal yang menarik justru terjadi pada contoh kasus negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dimana dalam *Chapter V* Pasal 25 Piagam PBB merupakan penanggungjawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional justru tidak memprioritaskan operasi perdamaian PBB sebagai sistem keamanan kolektif dalam strategi pertahanan dan keamanan mereka. Hal tersebut lah yang mendasari rendahnya tingkat kontribusi pasukan dari negara-negara maju. Sejak Perang Dingin berakhir hingga sekarang, kontribusi pasukan Amerika Serikat untuk operasi perdamaian PBB menunjukkan angka penurunan dari waktu ke waktu. Puncak kontribusi Amerika Serikat terjadi pada Oktober 1993, dengan total mengirimkan 4.114 personil tentara dan polisi. Namun setelah kematian 18 tentara Amerika Serikat di Somalia, dan kegagalan misi PBB di Rwanda, Yugoslavia, dan Somalia menyebabkan para pembuat kebijakan di Amerika Serikat berpikir untuk melakukan pergeseran strategi terhadap partisipasi pasukan Amerika Serikat untuk operasi perdamaian PBB. *Presidential Decision Directive* (PDD) 25 atau Keputusan Presiden yang ditandatangani oleh Mantan Presiden AS, Bill Clinton pada Mei 1994, lalu diikuti dengan *Quadrennial Defense Review* (QDR) yang dirilis Maret 2014, dan "Strategi Keamanan Nasional" yang dirilis pada musim semi 2014 mengantarkan Amerika

Serikat kepada strategi pertahanan yang baru, yang melunturkan komitmen Amerika Serikat terhadap PBB untuk bersedia mengirimkan pasukan dalam jumlah besar.

Selain Konstitusi Amerika Serikat yang tidak berpihak pada dukungan terhadap pengiriman pasukan Amerika Serikat untuk operasi perdamaian PBB, terdapat faktor sentimen yang mendorong rendahnya tingkat keterlibatan pasukan Amerika Serikat pada operasi perdamaian PBB. Beberapa politisi Amerika Serikat terus melihat PBB sebagai "anti-Israel" dan tidak mendukung keterlibatan Amerika Serikat. Peningkatan keterlibatan pasukan Amerika Serikat di operasi perdamaian PBB juga secara politis tidak diinginkan oleh beberapa negara anggota PBB, terutama dari Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement / NAM*). Lalu ada juga kekhawatiran, baik di dalam PBB maupun pemerintah Amerika Serikat, bahwa keterlibatan pasukan Amerika Serikat yang signifikan dalam beberapa misi akan meningkatkan kemungkinan serangan teroris terhadap misi (Smith, 2014: 1-6).

Sama halnya dengan Amerika Serikat, sejak tahun 2000, kontribusi pasukan Inggris untuk operasi perdamaian PBB juga cenderung menurun dari tahun ke tahun. Rendahnya tingkat kontribusi Inggris untuk operasi perdamaian PBB juga dipengaruhi oleh kebijakan *2010 National Security Strategy* (Strategi Keamanan Nasional) Inggris yang dikeluarkan pada tahun 2010, yang tidak menjadikan operasi perdamaian PBB sebagai prioritas utama. Strategi Keamanan Nasional Inggris tahun 2010 tersebut secara eksplisit mendefinisikan tujuan utama keamanan nasional Inggris antara lain: (1) memastikan Inggris yang aman dan tangguh - melindungi warga negara, ekonomi, infrastruktur, wilayah dan kehidupan dari semua ancaman utama

yang dapat berpengaruh secara langsung; dan (2) membangun dunia yang stabil – melakukan tindakan di luar perbatasan untuk mengurangi kemungkinan ancaman yang mempengaruhi Inggris atau kepentingan Inggris di luar negeri. Ancaman utama bagi Inggris untuk lima tahun ke depan adalah: terorisme internasional, *cyber attack*, krisis militer internasional, dan kecelakaan besar atau bencana alam. Ancaman kedua yaitu: serangan terhadap Inggris atau wilayah luar negerinya, ketidakstabilan, pemberontakan atau perang saudara yang dapat dimanfaatkan oleh teroris untuk mengancam Inggris, peningkatan kejahatan terorganisir yang mempengaruhi Inggris, dan gangguan pada sistem informasi satelit (Williams, 2012: 3-4).

Namun, pada raihan *prestige* dan *public goods* yang bisa didapat dari peran pasukan negara kontributor dalam operasi perdamaian. Baik negara maju seperti China, maupun negara berkembang seperti Rwanda dan Indonesia menjadikan salah satu motif politik ini sebagai alasan tingginya kontribusi pasukan mereka. China misalnya, partisipasi pasukan China dalam operasi perdamaian PBB telah membantu proyek positif dan konstruktif untuk meningkatkan status dan kekuatan China di panggung politik global. Selain itu, operasi perdamaian PBB juga memberikan kesempatan untuk menampilkan sisi yang lebih positif dari kemampuan militer China, dan menunjukkan bahwa China merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang responsif, bertanggung jawab, dan menghormati piagam PBB (Huang, 2013: 2-3). Lalu Rwanda yang memanfaatkan keikutsertaannya dalam operasi perdamaian PBB untuk menunjukkan pada dunia bahwa Rwanda merupakan negara yang aman, cinta damai, dan mendukung upaya organisasi internasional seperti

PBB dalam menciptakan perdamaian. Hal ini terkait citra buruk Rwanda pasca genosida tahun 1994 (Beswick & Jowell, 2014: 2-3). Serta Indonesia yang bertekad mengirimkan 10.000 pasukan perdamaian PBB agar dapat menjadi salah satu dari 10 negara dunia yang berkontribusi besar dalam operasi perdamaian PBB (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/20/m16zy4-indonesia-targetkan-kirim-10-ribu-pasukan-perdamaian-pbb> diakses pada 30 Maret 2014).

Begitu pula pada motif 'Agar Menjadi Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB'. Baik negara maju maupun negara berkembang menjadikan reformasi keanggotaan tetap Dewan Keamanan PBB sebagai alasan tingginya kontribusi mereka dalam operasi perdamaian PBB. Negara maju seperti Jepang dan Jerman memiliki kontribusi besar dalam hal sumbangan dana untuk operasi perdamaian PBB, bahkan melebihi sumbangan dana dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Sementara mereka tetap menjaga konsistensi jumlah pasukan mereka yang dikirim untuk operasi perdamaian PBB, meskipun dalam jumlah yang relatif sedikit. Sedangkan negara berkembang dengan perekonomian relatif stabil seperti Brazil dan Afrika Selatan memiliki kontribusi jumlah pasukan yang cukup besar dalam operasi perdamaian PBB sebagai upaya mereka untuk meningkatkan pengaruh di tingkat internasional, dan khususnya di tingkat regional. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai strategi meningkatkan citra mereka sebagai calon yang cocok untuk keanggotaan Dewan Keamanan PBB.

Partisipasi pasukan perdamaian Bangladesh dalam misi penjaga perdamaian PBB telah menjadi komponen penting dari kebijakan luar negeri Pemerintah Bangladesh. Bangladesh

menerapkan kebijakan partisipasi aktif dalam proses perdamaian global dan regional, serta berkomitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan cara multilateral. Kebijakan ini merupakan perwujudan dari implementasi piagam PBB ke dalam konstitusi nasional negaranya (<http://www.dandc.eu/en/article/why-bangladesh-sends-troops-un-missions-and-how-world-benefits-such-engagement> diakses pada 11 maret 2014), yaitu Pasal 25-1, yang secara garis besar menyatakan pentingnya bagi Bangladesh untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=367§ions_id=24573 diakses pada 13 Juni 2014).

Bagi Bangladesh, keikutsertaan pasukannya dengan jumlah terbanyak di dunia dalam operasi perdamaian PBB selain sebagai pengimplementasian piagam PBB dan Pasal 25 ayat 1 konstitusi nasional, juga untuk mengejar motif politik yang bersifat pragmatis. Pemerintah dan Institusi militer Bangladesh mengirimkan pasukan untuk operasi perdamaian PBB dalam rangka untuk mempromosikan citra positif negara. Sedangkan bagi pasukan Bangladesh, mereka ingin Bangladesh dikenal karena sesuatu yang membanggakan, bukan karena kondisi politik yang buruk dan bencana alam yang selama ini menjadi citra Bangladesh. Dalam pidatonya pada kesempatan Hari Internasional Pasukan Perdamaian PBB di tahun 2011, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pasukan perdamaian Bangladesh karena telah mengangkat citra negara di arena internasional (Bellamy & Williams, 2013: 195).

Bagi negara yang memiliki sejarah pengalaman pretorianisme militer, seperti Bangladesh, operasi perdamaian PBB yang

memungkinkan penempatan pasukan ke wilayah luar negeri juga menjadi motivasi dan kesempatan bagi Bangladesh untuk meningkatkan profesionalisme militernya dan menjauhkan militer mereka dari urusan politik di dalam negeri, hingga melakukan kudeta. Bangladesh memiliki sejarah yang panjang dalam menghadapi masalah kudeta dan diktator militer sebelum demokrasi sepenuhnya ditegakkan pada tahun 1990. Dengan mengenal tentara negara-negara lain dan bekerja di bawah sistem PBB, tentara Bangladesh tidak lagi tertarik pada kudeta, dan lebih cenderung melindungi demokrasi dan membangun lembaga demokrasi (<http://www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/2012/05/04/feature-02> diakses pada 16 April 2013).

Selain kebijakan dari pemerintah Bangladesh, penilaian lain, seperti prestasi pasukan di lapangan dan sejarah negara juga menjadi pertimbangan dari PBB dalam melakukan panggilan kepada pasukan negara anggota untuk berkontribusi dalam operasi perdamaian PBB. Contohnya pernyataan dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, yang mengatakan bahwa tentara Bangladesh sering mendapat permintaan untuk ikut serta dalam operasi perdamaian PBB dikarenakan tentara mereka telah membuktikan diri memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Hanya ada sedikit keluhan mengenai tentara mereka daripada keluhan terhadap tentara negara lain. Sedikit keterlibatan Bangladesh dalam perang dan politik internasional juga merupakan keuntungan tersendiri. Negara ini hanya memiliki sedikit musuh, sehingga pasukannya mudah diterima oleh penduduk setempat di wilayah konflik (<http://news.bbc.co.uk/2/hi/south-asia/3763640.stm> diakses pada 29 Maret 2014).

Motif Ekonomi Bangladesh Dalam Pengiriman Pasukan Perdamaian PBB

Terkait dengan dominasi negara-negara berkembang dalam kontribusi pengiriman pasukannya untuk operasi perdamaian PBB dalam satu dekade terakhir, akhirnya memunculkan argumen yang menyatakan bahwa beberapa negara, terutama negara-negara berkembang, seperti Bangladesh, memiliki tingkat kontribusi yang tinggi dalam pengiriman pasukannya untuk operasi perdamaian PBB karena dorongan alasan atau motif ekonomi. Argumen tersebut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dr. Jonah Victor yang di muat dalam *Journal of Peace Research* yang berjudul *African peacekeeping in Africa: Warlord politics, defense economics, and state legitimacy* (Victor, 2010: 225) dan Penelitian dari Dr. Rashed Uz Zaman dan Niloy Ranjan Biswas yang dimuat dalam buku Alex J. Bellamy dan Paul D. Williams yang berjudul *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges and, Future of United Nations Peacekeeping Contributions*, yang pada intinya sama-sama menyatakan bahwa uang menjadi daya tarik utama bagi negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam operasi perdamaian PBB (Bellamy & Williams, 2013: 194).

Dalam mendiskusikan alasan-alasan ekonomi dalam pengiriman pasukan untuk operasi perdamaian PBB, maka penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menerima keuntungan dari dana kompensasi PBB untuk kontribusi pasukan dari suatu negara dalam operasi perdamaian PBB. Pihak yang akan diuntungkan tersebut antara lain:

1. Pemerintah Negara Asal, terutama negara-negara berkembang dengan tingkat ekonomi rendah, dimana dana kompensasi PBB digunakan untuk mendukung anggaran nasional.
2. Sektor Pertahanan dan Kemanan Nasional, yang dapat memanfaatkan dana kompensasi PBB untuk meningkatkan anggaran belanja pertahanan mereka.
3. Individu, pasukan baik tentara maupun polisi menerima gaji sebesar \$ 1.028 per bulan dari dana kompensasi PBB melalui pemerintahnya masing-masing. Bagi pasukan yang memiliki standar gaji lebih rendah di dalam negeri, gaji PBB tersebut akan memberi keuntungan finansial yang signifikan bagi kehidupan sosialnya.
4. Perusahaan swasta dan perusahaan nasional juga bisa mendapatkan keuntungan dari kontrak PBB untuk pengadaan berbagai barang, seperti daging sapi, air minum kemasan, transportasi udara, dan barang-barang lain yang digunakan dalam operasi penjaga perdamaian (Bellamy & Williams, 2013: 9).

Bagi negara maju, seperti Amerika Serikat yang memberikan sumbangan dana terbesar untuk operasi perdamaian PBB (\$ 2,111 Milyar) dan negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia (\$ 600 Milyar pada tahun 2013), dana kompensasi yang diberikan oleh PBB untuk kontribusi pasukan yang dikerahkan dalam operasi perdamaian PBB tentu bukanlah suatu faktor yang menarik bagi Amerika Serikat untuk bersedia mengirimkan pasukan dalam jumlah besar. Jika dibandingkan, satu tentara yang bertugas dalam operasi perdamaian mampu mengantongi uang sebesar \$ 1.210 per bulan sebagai bentuk gaji dan kompensasi lain. Sedangkan satu tentara Amerika Serikat memperoleh uang sebesar \$ 8.250 per bulan sebagai kompensasi yang meliputi gaji dan tunjangan lainnya (<http://work.chron.com/average-salary-us-soldier-9060.html> diakses pada 7 Juli 2014).

Namun manfaat lain yang dirasakan oleh Amerika Serikat dari kontribusi

terhadap operasi perdamaian PBB membuat Amerika Serikat memutuskan untuk tetap berkomitmen untuk bekerja dengan PBB guna mengatasi masalah-masalah internasional. Seperti contohnya pengalaman keikutsertaan pasukan Amerika Serikat pada misi *United Nations Mission in Liberia* (UNMIL) guna membangun perdamaian berkelanjutan di Liberia. Pada tahun 2003, dimana pasukan perdamaian PBB pertama kali berwenang untuk beroperasi di Liberia, total ekspor

Sedangkan pada contoh kasus negara berkembang, memang memperlihatkan bahwa tidak semua negara berkembang bersedia mengirimkan pasukannya untuk operasi perdamaian PBB, dan tidak semua negara berkembang tertarik pada keuntungan finansial yang bisa diperoleh dari dana kompensasi PBB. Namun Tabel 2 di bawah ini dapat dijadikan pedoman untuk menjelaskan kecenderungan sikap negara berkembang terhadap operasi perdamaian PBB.

Tabel 2

Daftar Kontributor Pasukan Perdamaian PBB Dari Negara-Negara Berkembang Disertai Gross Domestic Product (GDP) Tahun 2012

Rangking Dan Negara	Total Kontribusi Pasukan	Gross Domestic Product (GDP)	Income Level
1. Bangladesh	9430	\$ 116,4 Milyar	Low Income
2. Pakistan	9253	\$ 224,8 Milyar	Lower Middle Income
3. India	8036	\$ 1,858 Triliun	Lower Middle Income
4. Ethiopia	6092	\$ 42,8 Milyar	Low Income
5. Nigeria	5622	\$ 459,6 Milyar	Lower Middle Income
6. Rwanda	4344	\$ 7,1 Milyar	Low Income
7. Nepal	4043	\$ 19,2 Milyar	Low Income
8. Mesir	4030	\$ 262, 8 Milyar	Lower Middle Income
9. Yordania	3684	\$ 31,01 Milyar	Upper Middle Income
10. Ghana	2876	\$ 41,7 Milyar	Lower Middle Income
11. Brazil	2279	\$ 2,248 Triliun	Upper Middle Income
14. Afrika Selatan	2112	\$ 382,3 Milyar	Upper Middle Income

Sumber: "UN Peacekeeping Troop and Police Contributors" dalam http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/global_contribution.shtml dan "Tingkat GDP" dalam <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?locations=BD-8S-XM?display=default> diakses pada 5 Juli 2014.

AS ke Liberia mencapai \$ 33 Juta. Mulai dari tahun itu, perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Liberia meningkat tajam seiring tercapainya kemajuan perdamaian dan kehidupan sosial di Liberia, dengan nilai ekspor menjadi hampir \$ 200 Juta pada tahun 2011 (<http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/198218-un-peacekeeping-a-key-us-foreign-policy-tool> diakses pada 7 Juli 2014).

Dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa negara-negara kontributor pasukan terbanyak dalam operasi perdamaian PBB didominasi oleh negara-negara berkembang dengan tingkat GDP yang masih rendah. Hal ini dapat menjelaskan mengapa dana kompensasi yang diberikan oleh PBB dapat menjadi faktor pendorong tingginya tingkat kontribusi negara-negara berkembang tersebut. Dari situ dapat dilihat

suatu kecenderungan yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan rendah dan menengah kebawah (*low income* dan *lower middle income*) lebih bersedia untuk mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar demi mengejar keuntungan ekonomi yang bisa didapat dari keterlibatannya dalam operasi perdamaian PBB, dibandingkan dengan negara-negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah keatas (*upper middle income*), seperti Brazil dan Afrika Selatan yang lebih meletakkan alasan-alasan politik sebagai dasar kontribusinya dalam operasi perdamaian PBB.

Lalu pada kasus Bangladesh, selain motif-motif politik, keuntungan ekonomi yang bisa didapat dari keikutsertaan dalam operasi perdamaian PBB merupakan motif utama dibalik keputusan Bangladesh dalam mengirimkan pasukannya untuk operasi perdamaian PBB. Partisipasi dalam sejumlah misi tersebut tidak hanya meningkatkan *prestige* dari tentara Bangladesh di luar negeri tetapi juga telah memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pendapatan para pasukan yang ikut berpartisipasi (Islam XLV: 29, 2010: 78).

Gaji yang diberikan oleh PBB sebesar \$ 1.028 per bulan per prajurit, jauh lebih besar jika dibandingkan gaji pasukan Bangladesh yang bertugas di dalam negeri, yaitu \$ 180 per bulan per prajurit. Dengan perbandingan tersebut, bergabung dalam pasukan perdamaian PBB jelas merupakan pilihan yang lebih menguntungkan. Bagi pasukan Bangladesh, dana kompensasi PBB atas partisipasinya dalam operasi perdamaian PBB dapat digunakan untuk membiayai kehidupan keluarganya, membeli tanah dan rumah, dan ditabung untuk masa pensiun (<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/201252982553900996.html> diakses pada 25 Juni 2014).

Dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat juga bahwa Bangladesh merupakan negara dengan tingkat GDP rendah, dan meskipun Bangladesh mengalami kemajuan ekonomi yang cukup besar selama dua dekade terakhir, namun Bangladesh masih berjuang untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan sumber daya ekonomi yang terbatas. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari peluang ekonomi di luar negeri dan ini dapat menjelaskan mengapa tingkat kompensasi PBB untuk kontribusi pasukan perdamaian sangat menarik bagi Bangladesh. Dari data yang ada, menyebutkan bahwa Bangladesh menerima total \$ 1,287 Milyar dari dana kompensasi PBB untuk kontribusi pasukan dan pengganti untuk pemakaian senjata pribadi selama tahun 2001-2010. Jumlah yang tentu sangat besar bagi negara seperti Bangladesh yang memiliki sumber ekonomi terbatas (Zaman & Biswas, 2014: 3).

Operasi perdamaian PBB juga telah mempengaruhi anggaran pertahanan Bangladesh dan pengadaan peralatan militer untuk melengkapi kontingen pasukannya dengan senjata yang lebih modern guna memenuhi persyaratan PBB. Pemerintah Bangladesh telah menyetujui kenaikan alokasi anggaran yang berhubungan dengan pertahanan dari \$ 1,3 Milyar pada 2010-2011 menjadi \$ 1,5 Milyar pada 2011-2012 (Bellamy & Williams, 2013: 200).

Bagi Bangladesh *Armed Forces Division* (Instansi Militer Bangladesh), kenaikan anggaran pertahanan dan dana kompensasi dari keikutsertaan dalam operasi perdamaian PBB ini telah membantu mereka untuk melakukan pembelian dan pemeliharaan peralatan militer yang tidak akan bisa diperoleh dalam keadaan normal (tidak berkontribusi dalam operasi perdamaian PBB). Seperti contohnya baru-baru ini, Pemerintah Bangladesh dan *Bangladesh Armed Forces Division* telah

mencapai kesepakatan senilai \$ 1 Milyar dengan Rusia. Kesepakatan ini mencakup pembelian helikopter Mi-17, *combat trainer aircraft*, *pontoon bridges*, *armored personal carriers* dan rudal anti tank (Zaman & Biswas, 2014: 5).

Selain mampu melengkapi peralatan persenjataan dari dana kompensasi keikutsertaan dalam operasi perdamaian PBB, *Bangladesh Armed Forces Division* juga telah mampu untuk mendirikan *Bangladesh Institute of Peace Support Operations Training* (BIPSOT), sebuah pusat pelatihan khusus yang sangat bergengsi di dunia yang difungsikan untuk memberikan pelatihan dan persiapan kepada pasukan Bangladesh yang akan diberangkatkan untuk operasi perdamaian PBB. Sejak didirikan pada tahun 1999, lebih dari 1.200 tentara dari 26 negara datang untuk belajar bagaimana menjalankan misi dalam operasi perdamaian dari pengalaman pasukan Bangladesh (Bellamy & Williams, 2013: 192).

Kesimpulan

Ungkapan mengenai "tidak ada teman sejati ataupun musuh abadi, yang kekal dan abadi hanyalah kepentingan" serupa dengan apa yang terjadi pada operasi perdamaian PBB, dimana sejak pertama kali mengerahkan pasukan ke wilayah konflik pada tahun 1948 hingga sekarang, operasi perdamaian PBB selalu dibarengi dengan kepentingan dari negara-negara anggotanya. Jika selama masa Perang Dingin operasi perdamaian PBB menjadi sarana persaingan dua kekuatan adikuasa dunia (bipolar) untuk memperkuat pengaruhnya di dunia. Kini, dalam satu dekade terakhir, dimana operasi perdamaian PBB memasuki masa abad ke-21, kepentingan nasional dari negara-negara anggota, baik kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi menjadi

motivasi dibalik pengiriman pasukan perdamaian PBB.

Dana kompensasi PBB yang memiliki pengaruh kuat dalam memotivasi Bangladesh dan negara-negara berkembang lain untuk berkontribusi besar dalam operasi perdamaian PBB, memunculkan suatu kesimpulan bahwa motif ekonomi dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB lebih dominan dibandingkan motif politik, yang meskipun semua negara anggota PBB telah menyepakati *Chapter V* pasal 25 piagam PBB, namun pada kenyataannya tidak semua negara bersedia mengirimkan pasukannya untuk operasi perdamaian PBB.

Meskipun selama 66 tahun dalam perkembangannya operasi perdamaian selalu dibarengi oleh kepentingan nasional dari negara-negara anggotanya sebagai motif dibalik pengiriman pasukan perdamaian PBB. Namun, tidak dapat disangsikan bahwa operasi perdamaian PBB dengan pasukan multinasionalnya telah menjadi alat keamanan kolektif yang paling efektif dalam memelihara perdamaian dan keamanan global hingga saat ini.

Daftar Pustaka

- Andersson, Andreas. (2000). *Democracies and UN Peacekeeping Operations, 1990-1996. International Peacekeeping*, 7 (2): 1-22.
- Bellamy, Alex J., Paul D. Williams, Stuart Griffin (2004). *Understanding Peacekeeping*. Cambridge: Polity Press,.
- Bellamy, Alex J. and Paul D. Williams. (2012). *Broadening the Base of United Nations Troop- and Police-Contributing Countries, Providing for Peacekeeping*

- No. 1. New York: International Peace Institute.
- (2013). *Providing Peacekeepers: The Politics, Challenges and, Future of United Nations Peacekeeping Contributions*. London: Oxford University Press.
- Beswick, Danielle and Marco Jowell. (2014). *Contributor Profile: Rwanda*. Version: 17 March 2014, a project of the International Peace Institute and The Elliott School at George Washington University..
- Durch, William J. and Madeline L. England. (2009). *The Purposes of Peace Operations*. New York: Center on International Cooperation, New York University.
- Fisher, Ronald J. (2001). *Methods of Third-Party Intervention*. Berlin: Berghoff Handbook for Conflict Transformation.
- General Assembly. (2004). *High-level Panel on Threats, Challenges and Change*. United Nations A/59/565.
- Huang, Chin-Hao. (2013). *Contributor Profile: The People's Republic of China*. Version 8 February 2013, a project of the International Peace Institute and The Elliott School at George Washington University..
- Islam, Nurul. (2010). The Army, UN Peacekeeping Mission and Democracy in Bangladesh. *Economic & Political Weekly XLV*: 29.
- Krause, Joachim & Natalino Ronzitti (2012). *The EU, the un and Collective Security: Making Multilateralism Effective*, Routledge, New York, 2012.
- Perry, Chris and Adam C. Smith, *Trends in Uniformed Contributions to UN Peacekeeping: A New Dataset, 1991–2012*. New York: International Peace Institute.
- Ram, Sunil. (2008). *The History of United Nations Peacekeeping Operations During The Cold War: 1945 to 1987*. Williamsburg :Peace Operations Training Institute.
- Smith, Adam C. (2014). *Contributor Profile: United States of America*. Version March 2014, a project of the International Peace Institute and The Elliott School at George Washington University.
- Victor, Jonah. (2010). African peacekeeping in Africa: Warlord politics, defense economics, and state legitimacy. *Journal of Peace Research* 47(2).
- Williams, Paul D. (2012). *Contributor Profile: The United Kingdom*. Revised 17 September 2012, a project of the International Peace Institute and The Elliott School at George Washington University.
- Zaman, Rashed Uz & Niloy Ranjan Biswas. (2014). *Contributor Profile: Bangladesh*. Version: 27 may 2014, a project of the International Peace Institute and The Elliott School at George Washington University.

Internet

- Widodo, Bangkit Rahmat Tri. *Misi Pemeliharaan Perdamaian Indonesia Dalam Mendukung Politik Luar Negeri Bebas Aktif*. diunduh pada 25 Mei 2013. Universitas Pertahanan Indonesia 68-87, Jakarta, 2012, Hal. 69. Dalam http://idu.ac.id/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=31&Itemid=309
- 60 Years United Nations Peacekeeping: Looking Back / Moving Forward*. diakses pada 24 Mei 2014. dalam <http://www.unis.unvienna.org/unis/en/60yearsPK/index.html>
- Bangladesh Troops Lead Global Peacekeeping*. diakses pada 25 Juni 2014. Dalam

- <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/201252982553900996.html>
- Bangladeshi UN peacekeepers earn respect, abroad and at home. diakses pada 16 April 2013. dalam <http://www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apwi/articles/features/2012/05/04/feature-02>
- Brahimi Report. diakses pada 25 Juni 2014. dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/reform.shtml>
- History of Peacekeeping. diakses pada 26 Mei 2014. dalam <http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/history.shtml>
- Indonesia targetkan Kirim 10 Ribu Pasukan Perdamaian PBB. diakses pada 30 Maret 2014. dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/20/m16zy4-indonesia-targetkan-kirim-10-ribu-pasukan-perdamaian-pbb>
- Kabir, Mohammad Humayun. *Global Benefits, National Motives*. diakses pada 11 maret 2014. artikel dalam <http://www.dandc.eu/en/article/why-bangladesh-sends-troops-un-missions-and-how-world-benefits-such-engagement>
- Size of Peacekeeping Forces (1947-2011). diakses pada 9 September 2014. dalam <https://www.globalpolicy.org/security-council/peacekeeping/peacekeeping-data.html>
- The Average Salary of U.S. Soldier. diakses pada 7 Juli 2014. dalam <http://work.chron.com/average-salary-us-soldier-9060.html>
- The Constitution Of The People's Republic Of Bangladesh. diakses pada 13 Juni 2014. Dalam http://bdlaws.minlaw.gov.bd/sections_detail.php?id=367§ions_id=24573
- The Cream of Peacekeeping. diakses pada 29 Maret 2014. dalam http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/3763640.stm
- UN Peacekeeping: a Key U.S. Foreign Policy Tool. diakses pada 7 Juli 2014. dalam <http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/198218-un-peacekeeping-a-key-us-foreign-policy-tool>